

ASEAN di Tengah Rivalitas AS dan Cina: Kerja sama ASEAN dengan RCEP dalam Men- gurangi Dampak Perang Dagang

**Febrina Damayanti, Noviar Indira M.P., Retno Sri Wahyuni, M. Rahadi-
an Prayoga, dan Giovanni Kevin N.W.**

Universitas Diponegoro

Abstract

Rivalry among the US and Cina about trade war gives enormous effects towards many states around the world, including ASEAN. ASEAN region is the central market on Pacific. Because of this rivalry, every Cina's export to US will decrease about 10%, and also reduce 1.1% economy growth in ASEAN. This phenomenon emerges the big question concerning the role of ASEAN. This research paper will answer the role of ASEAN as the multilateral organization on balancing their interests in the middle of trade war. Afterwards, this paper focuses on the topics of rivalry between US and Cina related to economics. The discussion is divided into two main points, first is about the trade war, and second is the role of RCEP to establish the balance of ASEAN's economy. International cooperation on liberal perspective is used to analyze these case problems. This paper argues that ASEAN is trying to impetus cooperation between its member for facing the challenge of the US and Cina's trade war. Cooperation is the best way for ASEAN seeing this phenomenon.

Keywords: *US, Cina, trade war, economy, liberalism*

Abstrak

Rivalitas AS dan Cina dalam perang dagang memberikan dampak nyata terhadap negara-negara di dunia, termasuk negara-negara anggota ASEAN. ASEAN dilihat dari wilayahnya merupakan pusat pasar yang dinamis di daerah Pasifik. Akibat dari rivalitas tersebut, setiap ekspor Cina ke AS berkurang 10% akan mengurangi setidaknya 1,1% pertumbuhan ekonomi negara-negara di ASEAN. Melalui peristiwa tersebut, maka peran yang dapat diambil oleh ASEAN menjadi sebuah pertanyaan. Tulisan ini meneliti bagaimana peran ASEAN sebagai wadah kerja sama multilateral anggotanya dalam menyeimbangkan kepentingan negara anggotanya di tengah rivalitas kedua negara tersebut. Tulisan akan difokuskan dalam membahas rivalitas kedua negara tersebut terbatas dalam bidang ekonomi, dengan terbagi menjadi dua pembahasan utama, yaitu perang dagang AS dan Cina serta peran RCEP sebagai penyeimbang ekonomi di ASEAN. Kerja sama Internasional dalam perspektif liberalisme akan digunakan sebagai alat analisis. Tulisan ini berargumen bahwa ASEAN berusaha untuk meningkatkan kerja sama nya dengan sesama negara ASEAN bahkan diluar ASEAN dalam menghadapi tantangan perang dagang AS dan Cina. Kerja sama menjadi hal paling rasional yang dilakukan ASEAN dalam melihat fenomena yang terjadi.

Kata-kata kunci: *AS, Cina, perang dagang, ekonomi, liberalisme*

Latar Belakang

Tercatat sebagai negara yang menjalin kerja sama dalam tingkat bilateral dan multilateral dengan ASEAN, rivalitas antara AS dan Cina saat ini memberikan dampak besar terhadap ASEAN secara keseluruhan. Rivalitas yang berlangsung antara kedua negara adidaya ini juga tidak terjadi tanpa alasan. Pada Maret 2018 lalu, Presiden Donald Trump mencanangkan mosi untuk *sweeping tariffs* dari segala barang impor Cina yang masuk ke dalam AS hingga mencapai US\$60 miliar. Hal ini menjadi respon dari Presiden Trump terkait dugaan Cina kepada AS terkait pencurian teknologi dan kekayaan intelektual. Bahkan, menurut *Senior White House Officials*, US Trade Representative telah mengidentifikasi 1.300 jenis barang lainnya yang dapat mencapai tarif US\$50 miliar sebagai target potensial selanjutnya. Barang-barang tersebut mencakup *aerospace*, teknologi informasi dan komunikasi, dan mesin (Thomas & Wiseman, 2018). Menanggapi kebijakan AS tersebut, Cina memberlakukan langkah-langkah 'balas dendam' pada awal April terhadap berbagai produk AS, yang memicu kekhawatiran akan perang dagang antara negara dengan ekonomi terbesar di dunia (Council on Foreign Relations, 2018).

Perang dagang antara AS mulai mencapai titik bereskalasi pada Juli 2018. Pemerintahan Trump membebankan tarif baru sebesar US\$34 miliar barang impor dari Cina. Lebih dari 800 produk Cina di sektor industri dan transportasi, serta barang-barang seperti televisi dan peralatan medis, akan dikenakan pajak impor senilai 25%. Sebagai respon terhadap kebijakan tersebut, Cina memberlakukan kebijakan berupa tindakan menentukan sendiri tarif kepada lebih dari 500 produk AS yang bernilai total US\$34 miliar, dengan target komoditas seperti daging sapi, susu, makanan laut, dan kacang kedelai. Presiden Trump dan anggota pemerintahannya percaya bahwa Cina "merusak" AS, mengambil keuntungan dari aturan perdagangan bebas, hingga merugikan perusahaan AS yang beroperasi di Cina. Menanggapi hal tersebut, Cina memberi kritik terkait langkah-langkah pemerintahan Trump sebagai "perdagangan intimidasi" dan memperingatkan bahwa kebijakan mengenai tarif dapat memicu kerusuhan pasar global (Council on Foreign Relations, t.t).

Perang dagang antara AS dan Cina memberikan dampak nyata terhadap kestabilan negara-negara anggota ASEAN, terutama dalam masalah ekonomi. Dampak ini dirasakan terutama oleh negara-negara yang bergantung kepada kegiatan ekspor kedua negara tersebut, seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Vietnam dan Malaysia melakukan ekspor terbanyak terhadap AS dan Cina, membuat kedua negara tersebut semakin terekspos. Terlebih, Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki sektor produksi yang cukup besar, yang terintegrasi dengan jaringan global, sehingga kegiatan produksi tersebut dapat terganggu dengan tarif yang

diberlakukan. Namun, pemberlakuan tarif ini juga dapat menguntungkan beberapa negara di ASEAN, seperti industri kimia Malaysia dan sektor barang konsumsi Vietnam. Selain itu, tarif yang diberlakukan Cina terhadap barang primer AS dapat membantu eksportir buah Thailand dan pemilik peternakan sapi Myanmar untuk mengambil keuntungan dari pasar (Reynolds, 2018).

Dalam menangani dampak tersebut, ASEAN berusaha meningkatkan kerja sama dengan enam negara lainnya yang tergabung dalam *Regional Comprehensive Economic Forum* (RCEP). RCEP bekerja sama dalam meningkatkan perdagangan serta investasi, dengan harapan dapat memperkuat ekonomi negara-negara anggotanya. Kerja sama dipandang sebagai cara yang paling efektif dalam menghadapi dampak buruk yang terjadi, terlebih rivalitas antara AS dan Cina yang berkaitan dengan ekonomi telah menjadi permasalahan seluruh negara. RCEP dalam tulisan ini akan dijadikan fokus utama sebagai bentuk kerja sama dalam melihat kemampuan ASEAN dalam menjaga kepentingannya di tengah rivalitas AS dan Cina dalam bidang ekonomi.

Tulisan ini akan dibagi ke dalam empat bagian. Bagian pertama akan membahas mengenai konsep kerja sama internasional dalam perspektif liberalisme sebagai kerangka pemikiran yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam tulisan ini. Bagian kedua akan membahas mengenai perang dagang antara AS dan Cina, di mana bagian ini akan menjelaskan bagaimana perang dagang antara kedua negara tersebut dapat terjadi hingga saat ini. Bagian ketiga akan membahas peran RCEP dalam kaitannya dengan perang dagang AS dan Cina, bagaimana RCEP sebagai institusi berfungsi membantu ASEAN dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah perang dagang yang sedang berlangsung. Kemudian, bagian terakhir akan berisi kesimpulan dari seluruh penjelasan pada bagian sebelumnya.

Kerja sama Internasional dalam Perspektif Liberalisme

Kerja sama internasional dapat diartikan sebagai kerja sama yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Rezim internasional sebagai hasil dari kerja sama internasional adalah seperangkat instrumen yang dapat digunakan negara untuk mencapai tujuan masing-masing (Poletti, 2017). Kerja sama internasional terjadi ketika aktor-aktor internasional saling menyesuaikan perilaku dan sikap terhadap preferensi masing-masing melalui proses koordinasi kebijakan (Clackson, 2011). Pada dasarnya, kerja sama seharusnya mengarah pada *rewards* yang akan diperoleh negara-negara yang terlibat. Sama halnya dengan konflik, kerja sama internasional haruslah melibatkan dua aktor atau lebih. Pemahaman mengenai adanya *common interest* digunakan sebagai dasar dalam kerja sama internasional (Hasenclever et al, 2007).

Menurut kaum liberal, penggunaan instrumen militer bukan menjadi hal yang penting di era modern ini sehingga kerja sama antar negara akan menjadi perhatian dunia, meskipun sebelumnya dianggap sebagai hal yang tidak mungkin terjadi. Fenomena tersebut memperkuat perspektif kaum liberal yang mengambil pandangan positif tentang sifat manusia. Sebagai salah satu teori utama hubungan internasional, liberalisme percaya bahwa kebebasan, kerja sama, dan perdamaian membawa manusia kepada kemajuan dunia internasional sehingga perang bisa dihindarkan (Jackson & Sorensen, 2013). Namun, karena dianggap terlalu idealis, teori ini menyempurnakan diri ke arah yang lebih modern dan menyesuaikan jaman, sehingga bisa lebih diterima dunia secara luas dan meninggalkan kesan utopis. Nama neoliberalisme kemudian muncul sebagai pendekatan liberal yang diperbaharui dengan menggunakan ide dari kaum liberal klasik (Jackson & Sorensen, 2013). Neoliberalisme sendiri dianggap sebagai teori yang lebih mutakhir daripada teori pendahulunya, yaitu liberalisme. Cakupan dari neoliberalisme juga bertambah luas, yaitu mengenai keamanan, kesejahteraan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Teori neoliberalisme erat kaitannya dengan kerja sama internasional yang bercirikan adanya interdependensi kompleks, karena ada banyak bentuk hubungan antara masyarakat selain dari pemerintah. Neoliberalisme mengangkat tema mengenai eksistensi organisasi dan kerja sama internasional yang didasarkan pada ekonomi (Martin, 2007). Negara bukanlah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, dan institusi dianggap penting sebagai penghubung antara aktor satu dan yang lainnya.

Dalam kajian kerja sama internasional, fokus utama dari paham neoliberalisme adalah ekonomi politik internasional dan isu lingkungan. Dapat dilihat bahwa neoliberalisme sangat dekat dengan praktik ekonomi politik yang membawa arah kesejahteraan bagi negara (Thompson, 2015). Kemudian, neoliberalisme juga memandang bahwa seperangkat aturan dan institusi internasional dapat meredakan potensi terjadinya konflik internasional, dengan cara mempengaruhi hubungan antar negara yang pada dasarnya memang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda (Tarzi, 2004). Dengan kata lain, neoliberalisme dapat menahan adanya konflik dan justru mengubah perilaku negara (Tarzi, 2004).

Neoliberalisme dalam memandang kerja sama internasional melalui institusi tetap mengacu pada pertimbangan keuntungan yang akan diterima negara. Namun, berbeda dengan konsep *zero sum game* dalam neorealisme, neoliberalisme percaya bahwa setiap negara yang terlibat dalam kerja sama haruslah mendapat keuntungan, walaupun dalam porsi yang berbeda (Tarzi, 2004). Konsep keuntungan dalam neoliberalisme dikenal sebagai *absolute gains*. Konsep *absolute gain* tidak melihat perbedaan hasil kuantitas dari kerja sama yang dilakukan. Misalnya, terdapat kerja sama

antara pihak A dan B, pihak A mendapatkan keuntungan 40%, sedangkan pihak B mendapat keuntungan 60%. Hal tersebut tidak menjadi permasalahan, yang diutamakan adalah kedua belah pihak sama-sama mendapatkan *benefits* terlepas dari kuantitasnya.

Ekonomi sebagai salah satu fokus kerja sama internasional dalam neoliberalisme menjadikan konsep *ecological domain* digunakan dalam paham ini. *Ecological domain* berarti kebutuhan akan dominasi sebuah institusi dalam sebuah "sistem ekologi", yang dalam ilmu sosial dapat diartikan sebagai lingkungan di sekitar negara (Jessop, 2012). Termasuk di dalamnya adalah *ecological dominance*, yaitu pembahasan tentang dampak positif dan negatif dari keuntungan yang diterima negara, mediasi pasar, dan *crisis prone* dari sistem kapital (Jessop, 2012). Dalam melakukan kerja sama internasional, negara secara tidak langsung diharuskan menyerahkan sedikit kedaulatannya. Neoliberalisme memandang hal ini sebagai alat untuk *bargaining resources*, yang nantinya akan memungkinkan negara untuk melakukan negosiasi dengan negara lain, bahkan memperkuat posisinya dalam kerja sama internasional (Keohane, 2012).

Kerja sama internasional dipilih oleh kaum neoliberalisme karena dianggap lebih efektif dan biaya yang dikeluarkan tidak akan sebanyak penggunaan instrumen militer yang berpotensi menimbulkan *collateral damage* (Powell, 1991). Tradisi liberal dalam *The Rise of Trading States* menyebutkan bahwa sistem perekonomian terbuka akan membuat naiknya pertumbuhan ekonomi negara, tanpa harus melibatkan instrumen militer (Rosecrance, 1986). Ketika perekonomian tumbuh, maka seluruh negara akan merasakan keuntungan, sehingga kerja sama menjadi sangat dibutuhkan, terutama dalam bidang ekonomi.

Salah satu bentuk kerja sama internasional yang paling berpengaruh adalah kerja sama regional. Setiap negara yang berdekatan secara geografis telah membentuk kerja sama regionalnya masing-masing. ASEAN adalah bentuk kerja sama regional, yang dengan seiring berjalannya waktu terus mengembangkan kerja sama dalam berbagai sektor. Dalam sejarah pembentukannya, ASEAN memang bertujuan untuk menahan pergerakan komunisme di Asia Tenggara. Namun, organisasi regional ini semakin memperkuat ikatan dengan menciptakan berkomitmen bersama dalam bidang ekonomi dan keamanan (Galbreath, 2008). RCEP sebagai cita-cita lanjutan ASEAN dari MEA merupakan salah satu perwujudan dari fokus bidang ekonomi tersebut. Menurut pandangan neoliberalisme, kerja sama ini tentunya akan membawa keuntungan ekonomi yang signifikan bagi negara-negara anggota. Hal ini mendorong kebutuhan ASEAN akan seperangkat aturan berupa kerja sama untuk dapat memberi kekuatan ekonomi terhadap negara-negara anggotanya, sesuai dengan konsep *ecological dominance* dari neoliberalisme.

Perang Dagang AS dan Cina

AS dibawah kepemimpinan Donald Trump memiliki slogan “*America First*” (BBC, 2017). Melalui slogan tersebut, tersirat keinginan AS untuk menjadi yang terbaik dan menjadi negara nomor satu di dunia. Namun, Cina menjadi salah satu rival AS dalam mewujudkan keinginan tersebut, mengingat kemajuan pesat yang sedang dialami Cina. Hal ini menjadikan kedua negara saat ini dikenal dengan negara *great power*, terutama dalam konteks kapasitas militer dan kemampuan ekonomi yang sangat kuat.

Dalam bidang militer, AS menghabiskan alokasi dana setidaknya US\$ 610 miliar, sedangkan Cina hanya US\$228 miliar (Forces.eu, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa AS masih menjadi yang terbaik dalam bidang militer, sehingga kekhawatiran AS terhadap Cina dianggap sebagai hal yang tidak perlu. Namun, dalam bidang ekonomi, AS merasa terancam oleh Cina. Secara historis, AS memiliki predikat sebagai negara dengan ekonomi terkuat selama 140 tahun. Namun, predikat ini menjadi terancam oleh keberadaan Cina, karena pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) Cina berkembang lebih tinggi dibanding AS (Desjardin, 2015).

Melalui laporan dari PDB Annual Growth Rate 2018, dapat diketahui bahwa Cina lebih stabil dalam hal ekonomi, dibuktikan dengan rata-rata GDP mencapai 6.75%, berkembang pesat dibanding GDP AS yang mencapai angka 4,2% per Juli 2018 (Economy Trading, 2018). Fenomena ini meningkatkan kewaspadaan AS terhadap Cina, sehingga setiap kebijakan AS dalam hal ekonomi membutuhkan pertimbangan yang besar, agar slogan terkait *America First* dapat direalisasikan.

Di bawah pemerintahan Donald Trump, AS berusaha membuat strategi ekonomi dalam menghadapi Cina melalui kebijakan kenaikan tarif barang dari Cina. Selama ini, AS memandang bahwa Cina telah mencuri kekayaan intelektual AS sehingga menyebabkan kerugian besar pada negara tersebut (BBC, 2018). AS juga telah melakukan pembukuan defisit dagang dengan Cina sebesar US\$375 miliar pada tahun 2017. Jumlah tersebut mencapai 2/3 dari total defisit dagang AS yang mencapai US\$566 miliar, atau dengan kata lain, sekitar 2/3 dari surplus global yang dilaporkan (Wirayani, 2018). Secara teori, penetapan bea masuk yang tinggi akan membuat produk buatan AS lebih murah daripada barang impor, sehingga mendorong konsumen untuk lebih membeli barang buatan AS. Efek peningkatan konsumsi produk dalam negeri pada akhirnya akan meningkatkan usaha setempat dan mendukung perekonomian nasional (BBC, 2018). Dibawah pemerintahan Trump, kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat PDB AS semakin tinggi dan lebih stabil dari Cina.

Sejak Juli 2018, AS tercatat telah tiga kali memberlakukan kebijakan kenaikan tarif barang dari Cina dengan total US\$250 juta (BBC, 2018). Barang impor yang diberlakukan tarif antara lain yaitu koper, tas jinjing,

kertas toilet, hingga wol. Melalui kebijakan ini juga, produk makanan juga dikenai bea masuk, diantaranya yaitu daging beku, beragam jenis ikan, kedelai, buah-buahan, serta beras. Tindakan AS yang agresif tersebut tentunya menimbulkan reaksi balasan dari Cina. Saat ini, negara tirai bambu tersebut juga telah menerapkan tarif pada barang impor AS dengan total US\$110 miliar (CNN, 2018). Tindakan saling balas tarif oleh kedua negara akhirnya menjadi peristiwa perang dagang di era modern ini.

AS adalah pihak yang menginisiasi terjadinya perang dagang dengan secara agresif mengenakan tarif yang tinggi kepada barang Cina. Namun, pembalasan tarif Cina terhadap barang impor AS menunjukkan jumlah barang yang lebih sedikit serta angka yang lebih rendah dibandingkan AS. Pemerintah Cina mengatakan bahwa Cina tidak akan terburu-buru untuk menyaingi nilai angka tarif yang diberikan AS (CNN, 2018). Dari respon, dapat dilihat bahwa Cina sebenarnya tidak ingin terjadi perang dagang yang berpotensi menghambat perekonomian negaranya. Pembalasan yang dilakukan Cina adalah langkah rasional yang dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Jika Cina tidak memberikan pembalasan, maka Cina akan rugi besar dengan membiarkan AS mengambil semua potensi ekonomi yang bisa dikembangkan Cina. Langkah pembalasan ini pada akhirnya harus dilakukan demi kepentingan nasional negaranya. Tindakan saling balas oleh kedua negara menimbulkan kekhawatiran internasional akan dampak buruk yang mungkin terjadi serta pengaruhnya terhadap perekonomian global. AS dan Cina merupakan dua kekuatan ekonomi besar dunia, dan apabila muncul ketidakstabilan ekonomi pada salah satu pihak, maka akan memunculkan efek domino. Salah satu kawasan yang merasakan efek ini adalah ASEAN. Hal ini dikarenakan negara-negara anggota ASEAN tercatat memiliki hubungan ekspor dan impor yang dominan dengan AS dan Cina.

ASEAN diprediksikan mengalami *collateral damage* (Matsumoto, 2018). Hal ini dikarenakan setiap kali pengurangan ekspor Cina ke AS mencapai angka 10%, maka akan mengurangi setidaknya 1.1% pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN (Political Insight, 2018). Perang dagang AS-Cina juga akan merugikan ASEAN sebagai institusi karena berpotensi menghambat terwujudnya *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*. Cina adalah partner dagang terbesar negara-negara anggota ASEAN, sementara AS berada di posisi keempat. Produk-produk ekspor dari kedua negara ini memberikan sumbangsih sebesar 20% dari total ekspor negara-negara ASEAN. Apabila perang dagang antara kedua negara ini terus berlanjut, maka produksi barang-barang ekspor antara keduanya akan stagnan, dan tentu saja akan berimbas kepada kosongnya *supply* dan tingginya *demand* produk di negara-negara anggota ASEAN.

Meski demikian, dampak yang disebabkan oleh perang dagang sebenarnya berbeda-beda bagi tiap negara di ASEAN, tergantung dari seberapa erat ketergantungan ekspor dan impor dari kedua negara. Misalnya, untuk dampak proteksionisme AS dan Cina, yang paling berimbas adalah negara Thailand, Singapura, dan Malaysia. Sedangkan untuk depresiasi uang, terlihat nyata berimbas ke Indonesia dan Filipina (Kushaka, 2018).

Namun, negara yang tidak bergantung erat pada kegiatan ekspor impor dengan AS dan Cina ternyata juga mengalami dampak negatif yang signifikan. Sebagai contoh, Indonesia dan Filipina mengalami jatuhnya pasar finansial sebagai dampak negatif dari hal ini, meskipun memiliki pasar domestik yang besar. Hal ini dikarenakan lemahnya posisi kedua negara tersebut, sehingga dapat mengalami depresiasi yang dilihat dari lemahnya nilai rupiah maupun peso. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian ekonomi dan sangat merugikan negara (Reynolds, 2018). Oleh karena itu, negara-negara ASEAN yang sebagian besar sedang dalam fase berkembang membutuhkan kerja sama dalam menangani dampak dari perang dagang antara AS dan Cina.

Peran RCEP dalam Menyikapi Perang Dagang AS dan Cina

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, ASEAN mendapatkan dampak buruk yang signifikan dalam terjadinya perang dagang. Berdasarkan prinsip neoliberalisme, negara akan memperkuat kerja sama dalam menghadapi suatu permasalahan ataupun konflik, terutama dalam bidang ekonomi (Powell, 1991). Meskipun RCEP telah dibentuk jauh sebelum perang dagang terjadi, RCEP telah dijadikan sarana kerja sama negara ASEAN+6 untuk mengurangi ancaman perang dagang. RCEP dianggap sebagai perluasan kerja sama bidang ekonomi ASEAN dalam rangka menghadapi perang dagang yang melibatkan enam negara lain di luar ASEAN. Terbentuknya RCEP menjadi sarana untuk mencapai modernitas, kualitas tinggi, dan keuntungan ekonomi yang saling timbal balik diantara anggotanya (ASEAN, 2018). Negara-negara dalam RCEP memiliki alasan yang kuat untuk bekerja sama karena terdapat *common interest* dalam upaya menanggulangi dampak negatif perang dagang yang sedang terjadi diantara AS dan Cina. *Common interest* ini cukup kuat untuk dijadikan dasar kerja sama yang efektif bagi RCEP. Perang dagang AS-Cina menjadi fenomena besar dalam hubungan internasional, dan isu tersebut menjadi ketakutan banyak negara di dunia. Bentuk kerja sama ini juga sesuai dengan *ecological dominance* yang berarti ASEAN membutuhkan seperangkat aturan yang dalam hal ini adalah RCEP sebagai kerja sama regional untuk tercapainya keuntungan bersama.

Adanya perang dagang antara AS dan Cina mengakibatkan sebuah efek, yaitu terjadinya proteksionisme yang dihindari banyak negara di dun-

ia. Prinsip proteksionisme juga tidak sesuai dengan pemikiran neoliberalisme karena akan mengakibatkan kerugian ekonomi dan berakibat pada ketidaksejahteraan negara. Proteksionisme menjadi musuh liberalisasi pasar, padahal liberalisasi pasar merupakan hal yang diidamkan pada era global, karena dapat memacu pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah. Dengan munculnya proteksionisme, kawasan ASEAN yang beranggotakan negara-negara yang memiliki hubungan dagang yang erat baik pada AS maupun Cina, memiliki kekhawatiran khusus karena akan merasakan dampak secara langsung. Hasil dari proteksionisme akan membentuk pemberlakuan tarif tinggi yang dinilai dapat merugikan negara, terutama negara berkembang karena tidak bisa leluasa memperluas pasar akibat terhalang tarif yang tinggi.

Pada awal pembentukan RCEP, kerja sama ini telah memiliki *framework* yang bertujuan untuk menghapuskan tarif serta berusaha untuk mengamankan akses pasar diantara anggotanya (ASEAN, 2018). Namun, pada masa awal pembentukannya, RCEP belum terlalu optimal digunakan karena belum adanya pertemuan rutin dan hasil yang memadai. Kemudian dengan adanya fenomena perang dagang, RCEP dapat dimanfaatkan untuk mengurangi rasa khawatir ataupun takut diantara negara anggota RCEP mengenai kenaikan tarif. Peran RCEP yang sebelumnya belum terlalu optimal, mulai menampilkan keseriusannya menanggulangi permasalahan yang terjadi. Dapat dilihat pada beberapa pertemuan yang semakin intensif pada tahun 2018 sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan Maret, Juli, dan Oktober lalu. Padahal, sebelumnya pertemuan RCEP hanya diadakan satu kali setahun.

Dimulai pada pertemuan bulan Maret lalu yang bertepatan dengan memanasnya hubungan AS-Cina, RCEP menghasilkan beberapa kesepakatan terkait instabilitas perekonomian dunia. Pertama, yaitu mengenai diskusi mengenai modalitas tarif dan parameternya, dan intensifikasi lebih lanjut dari proses permintaan dan penawaran. RCEP meningkatkan penawaran di semua jenis pasokan serta menjadi sarana kerja sama dalam penyelesaian masalah-masalah yang luar biasa. Pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan untuk mempercepat negosiasi tentang aturan, yang diarahkan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi dalam mendukung ekspansi dan pendalaman rantai nilai regional. Penekanan adanya potensi besar dari perundingan RCEP tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan lebih banyak pekerjaan, dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat di wilayah RCEP secara inklusif, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan perdagangan global (RCEP, 2018).

Ketika AS dan Cina secara resmi melakukan perang dagang pada bulan Juli, RCEP kembali melakukan pertemuan kelimanya, dan melaku-

kan perundingan yang berkaitan dengan perang dagang. Perundingan ini membahas mengenai pentingnya penyelesaian negosiasi RCEP dengan cepat dan konsisten dengan prinsip-prinsip panduan dan tujuan dalam RCEP, dengan mempertimbangkan situasi lingkungan perdagangan global saat ini sedang menghadapi risiko yang serius dari tindakan dan reaksi perdagangan sepihak, serta implikasi yang melemahkan negara ASEAN pada sistem perdagangan multilateral. Selain itu, negosiasi ini juga mengupayakan terciptanya fasilitas pergerakan ke arah penawaran termasuk melalui intensifikasi permintaan dan penawaran negosiasi (RCEP, 2018).

Pertemuan keenam RCEP di Singapura dilaksanakan pada 13 Oktober 2018 lalu. Terdapat beberapa pernyataan yang dikaitkan mengenai penanggulangan aksi perang dagang, dorongan terhadap intensifikasi pasar terbuka, serta upaya memperbaiki gap antara negara anggota RCEP. Seperti yang telah diketahui, anggota RCEP juga berasal dari negara berkembang dan ekonomi belum semapan, misalnya Singapura, Jepang dan Cina. Oleh karena itu, perundingan RCEP akan diselesaikan pada akhir tahun 2018. (RCEP, 2018).

Sementara itu, pada bulan November 2018, akan dilakukan pertemuan lagi. Permasalahan mengenai perang dagang cukup sulit dipandang sebagai alasan perlunya pertemuan yang intensif untuk menentukan solusi terbaik yang juga tidak akan menghasilkan langkah yang salah melalui RCEP. Perundingan RCEP yang dilakukan beberapa kali selama tahun 2018, membuktikan bahwa RCEP semakin aktif dalam upaya meminimalisir dampak negatif perang dagang AS dan Cina. RCEP memperkuat diskusi dan *framework* yang telah dibuat sejak awal pembentukannya sehingga jalan RCEP untuk menanggulangi perang dagang akan makin nyata. Melihat keseriusan yang dibangun, RCEP bukan lagi sekedar kerja sama yang mengambang namun sudah terinstitusi dengan segala bentuk *framework* yang telah menjadi dasar Bergeraknya aktivitas RCEP. Terkait adanya perang dagang, indikator diskusi mengenai isu tersebut bukan lagi implisit tetapi sudah eksplisit pada pertemuan di bulan Juli. RCEP telah memberi penekanan bahwa situasi ekonomi sedang tidak kondusif, sehingga segala aturan RCEP diupayakan dalam waktu yang cepat demi terciptanya *free trade* yang sukses. Indikator tersebut sebenarnya terlihat merujuk pada situasi perang dagang yang panas pada saat ini, dan RCEP berusaha menjadi solusi atas situasi tersebut.

Kerja sama dalam RCEP tersebut menunjukkan bahwa negara-negara anggota RCEP lebih mengutamakan kerja sama tanpa memperhitungkan siapa yang akan mendapat keuntungan lebih. Hal ini dapat dibuktikan dari formasi anggota RCEP, yang di dalamnya juga terdapat negara dengan kondisi ekonomi yang baik, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Salah satu konsep dari neoliberalisme adalah *absolute gains* yang menjelaskan bahwa

dalam melakukan kerja sama, negara-negara tidak terlalu mempermasalahkan siapa yang paling untung, karena yang menjadi dasar *absolute gains* bukanlah kuantitas yang didapatkan. Korea Selatan dan Jepang sebenarnya bisa saja bekerja sendiri-sendiri dalam rangka menangani perang dagang karena kekuatan negaranya yang dibidang cukup kuat. Namun, bergabungnya kedua negara tersebut bersama ASEAN dalam RCEP menandakan kerja sama internasional menjadi jalan yang terbaik untuk menanggulangi dampak negatif perang dagang. Komitmen yang telah dibuat dalam perundingan RCEP pada bulan November 2018 menyatakan bahwa RCEP menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan demi membentuk lingkungan ekonomi yang inklusif (Australian Government, 2018). Kata saling menguntungkan merujuk kepada arti bahwa tidak peduli jumlah siapa yang paling banyak dalam memperoleh keuntungan, tetapi semua akan mendapat untung dengan porsinya masing-masing. Peran RCEP juga menjadi harapan dan wujud optimisme negara-negara yang tergabung didalamnya. Contoh bahwa kerja sama RCEP mampu memberikan keoptimisan adalah ketika Perdana Menteri Singapura menyatakan bahwa beliau menaruh harapannya dan yakin kepada RCEP dalam peristiwa perang dagang (Business Standart, 2018).

Faktanya, total PDB negara-negara RCEP sangatlah besar, yaitu 30% dari total PDB dunia, dan potensi pasar anggota RCEP diprediksi mencapai US\$21,6 triliun (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2018). Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Indonesia, Bachrul Chairi menyatakan, bahwa kekuatan ekonomi 10 negara ASEAN saat ini hanya 5% dari produk domestik bruto (PDB) dunia atau sekitar US\$2,6 triliun (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2018). Dengan RCEP, kekuatan ekonomi negara-negara yang terlibat mencapai 30% dari PDB global atau sebesar US\$ 21,6 triliun. Selain itu, pasar ASEAN hanya mencapai 600 juta penduduk, dan target pasar RCEP yang mencakup 16 negara mencapai 3,4 miliar penduduk (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2018). Oleh karena itu, kerja sama RCEP terlihat secara jelas akan menguntungkan semua pihak yang terlibat didalamnya. Apabila keuntungan telah tercapai, maka kesejahteraan negara akan meningkat. Seperti yang dijelaskan dalam neo-liberalisme, negara dikatakan sejahtera apabila terdapat perkembangan dalam perekonomiannya, sehingga diperlukan kerja sama untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam hal ini, dapat diketahui prospek RCEP yang akan menjadi *mega trade* dunia. Jangkauan wilayahnya yang luas di pasar global akan mampu untuk menghilangkan hambatan tarif yang menjadi ancaman ketika terjadi perang dagang AS dan Cina untuk saat ini dan bisa pula menjadi tameng bagi perang dagang lainnya yang kemungkinan bisa terjadi dimasa depan.

Kesimpulan

Perang dagang yang terjadi antara AS dengan Cina menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari. Sebagai organisasi regional yang memiliki hubungan dengan kedua negara tersebut, ASEAN tentunya akan terpengaruh dengan rivalitas yang terjadi sebagai dampak dari perang dagang tersebut. Stabilitas ekonomi negara-negara anggota ASEAN akan goyah dan akan mempengaruhi banyak sektor, sehingga dibutuhkan suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan antara AS dengan Cina. Gagasan untuk menyelesaikan perang dagang tersebut akan sulit diselesaikan oleh ASEAN apabila ingin menjadi mediator karena ASEAN harus bersikap netral, sehingga akan lebih bijak apabila hal ini diselesaikan oleh negara-negara anggota ASEAN (tanpa mewakili ASEAN) dan beberapa negara lainnya. Oleh karena itu, RCEP tampil sebagai wadah dalam upaya menanggulangi dampak dari perang dagang tersebut. Melalui RCEP, dapat dilihat bahwa negara-negara anggota memiliki kemauan untuk melakukan kerja sama tanpa memandang kuantitas berapa banyak yang akan diperoleh, sesuai dengan konsep *absolute gains* dalam perspektif neoliberalisme.

Daftar Pustaka

- ASEAN. (2018) Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) [Online], ASEAN.org, 20 Oktober. Tersedia di: <https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership> [diakses 23 November 2018].
- BBC. (2017) Donald Trump: 'America first, America first' [Online], 2 Januari. Tersedia di: <<https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-38698654/donald-trump-america-first-america-first>> [diakses 20 Oktober 2018]
- Clackson, A. (2011). *Conflict and Cooperation in International Relations* [Online], *e-International Relations Students*, 2 Februari. Tersedia di: <https://www.e-ir.info/2011/02/01/conflict-and-cooperation-in-international-relations/#_ftn1> [diakses 21 September 2018].
- CNN. (2018) Cina Kenakan Tarif Balasan Untuk Produk Amerika [Online], 4 Agustus. Tersedia di: <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180804133135-532-319473/Cina-kenakan-tarif-balasan-untuk-produk-amerika>> [diakses 11 Oktober 2018].
- Council on Foreign Relations. (2018). U.S. Relations With Cina [Online], 20 Oktober. Tersedia di: <<https://www.cfr.org/timeline/us-relations-cina>> [diakses 23 Oktober 2018].
- Desjardin, J. (2015), September 15). Cina vs. United States: A Tale of Two Economies [Online], *The Visual Capitalist*, 15 September. Tersedia di: <<http://www.visualcapitalist.com/Cina-vs-united-states-a>

- tale-of-two-economies/> [diakses 30 September 2018].
- Galbreath, D. (2008). *International Regimes and Organizations*. Dalam: T. C. Salmon, *Issues in International Relations (2nd)*. New York: Routledge.
- Hasenclever, A., Peter M., & Volker R. (2000). Integrating Theories of International Relations. *Review of International Studies*, 26 (1), p. 2006.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2017). Potensi Pasar RCEP US\$ 21 T [Online], 7 Mei. Tersedia di: <<http://www.kemperin.go.id/artikel/10281/Potensi-Pasar-RCEP->> [diakses 23 Oktober 2018].
- Jackson, R. & Sorensen, G. (2013). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jessop, B. (2012). *Neoliberalism*. (Penyunt. G. Ritzer). Dalam *Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization*, Vol.1.
- Kushaka, K. (2018). *Concerns deepen over trade war impact on ASEAN, survey says* [Online], Nikkey Asian Review, 10 Juli. Tersedia di: <<https://asia.nikkei.com/Economy/Concerns-deepen-over-trade-war-impact-on-ASEAN-survey-says>> [diakses 9 November 2018].
- Martin, L. (2007). *Neoliberalism International Relations Theories*. Oxford: Oxford University Press.
- Poletti, A. (2017). Roberto Koehane: The Promises of Cooperation. Dalam: Vasquez, A. J. *Classics in International Relations*. Bologna: Il Mulino.
- RECP. (2018). The 6Th Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) [Online], ASEAN.org, 13 Oktober. Tersedia di: <<https://asean.org/6-th-regional-comprehensive-economic-partneship-rcep-intersessional-ministerial-meeting/>> [diakses 20 Oktober 2018].
- Reynolds, O. (2018). Which ASEAN countries are most exposed in the event of a U.S.-Cina trade war? [Online], Focus Economics, 29 Agustus. Tersedia di: <<https://www.focus-economics.com/blog/which-asean-countries-are-most-exposed-in-the-event-of-a-us-cina-trade-war>> [diakses 11 Oktober 2018].
- Tani, M. (2018), RCEP talks relegate US-Cina tariff battle to subplot status [Online], Nikkei Asian Review, 10 November. Tersedia di: <<https://asia.nikkei.com/Politics/International-Relations/RCEP-talks-relegate-US-Cina-tariff-battle-to-subplot-status>> [diakses 23 September 2018].
- Tarzi, S. M. (2004). Neorealism, Neoliberalism and the International System. *International Studies*, 41, pp. 115-128.
- Thomas, K., & Wiseman, P. (2018). Trump Orders Huge Tariffs on Cina, Raises Trade War Worries [Online], AP News, 23 Maret. Tersedia di: <<https://apnews.com/73e5e5aa-7be2408892e9904d642d2137>> [diakses 3 November 2018]

- Thompson, M. (2005). Reviewing: A Brief History of Neoliberalism [Online], 23 September. Tersedia di: <<http://rebels-library.org/files/d3Thompson-1.pdf>> [diakses 13 Oktober 2018].
- Weatherbee, D. E. (2009). *International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Widiartanto, Y. H. (2018). Negara-negara Asia Tenggara Sepakat Percepat Pakta Perdagangan RCEP [Online], Kompas, 29 April. Tersedia di: <<https://ekonomi.kompas.com/2018/04/29/134504826/negara-negara-asia-tenggara-sepakat-percepat-pakta-perdagangan-rcep>> [diakses 22 Oktober 2018].
- Wirayani, P. (2018). Panas Dingin AS-Cina yang Berujung Perang Dagang [Online], CNBC Indonesia. Tersedia di: <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180323115216-4-8293/panas-dingin-as-Cina-yang-berujung-perang-dagang>> [diakses 25 Oktober 2018].